

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief. Barda Nawawi, 2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*. Semarang. FH UNDIP.
- Ali. Achmad, 1998. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta. PT. Yarsif Watampone.
- Bohari. H, 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim. Abdul, Bawono Icut Rangga, dan Dara Amin. 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hanitjio Soemitro. Ronny, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghali Indonesia.
- Juliani. Henny, 2022. *Buku Ajar Hukum Keuangan Negara*, Semarang. Penerbit Yoga Pratama.
- Ilyas. Wiryawan B dan Burton Richard. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta. Salemba Empat.
- Monteiro. Josef Mario, 2019. *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Malang. Setara Pres.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta. Buku Litera Yogyakarta.
- Saebani. Beni Ahmad, 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung. Pustaka Setia.
- Soekanto. Soerjono, 1998. *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung. Ramadja Karya.
- Soekanto. Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2022 *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok. Rajawali Pers.
- Syukur. Abdullah, 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi
- Tambunan. Tulus, 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta. LP3ES.
- Usman. Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo.
- Wahab. Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Malang. Bumi Aksara.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat.
- Yani. Ahmad, 2006. *Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, Jakarta. Kencana.

JURNAL

- Ananda Amin Dwi dan Sulsilowati Dwi. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. X. Jilid. X, 2017.
- Ariska Devis Nurkumalasari, Dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun”, *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, Vol 2, No.2 (Januari 2020): 269-283.
- Badar Murifal, “Aspek Pajak Penghasilan Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2 No. 1 (April 2019):23-28.
- Budi Ispriyarso, “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, (2020):158-173.
- Cris Kuntadi, Galih Aggriwan, dan Didi Suryadi, “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN: Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Volume 4 No. 2 (November 2022):242-253.
- Enny Agustina, “Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Solusi*, Vol 18, No. 2 (September 2020): 407-418.
- Fatma Ulfatun Najicha, “Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 6, No. 1 (April 2022): 169-181.
- Ju Irmawati, “ Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta”, *Jurnal SIKAP*, Vol 6, No. 2. (2019): 112-121.
- Lutfi Maulana Hakim, “Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia”, *Jurnal Of International Studies*, Vol 1, No. 1. (Juni 2018): 61-90.
- Putu Wahyu Aggraini, “Analisis Pajak Penghasilan”, *Jurnal PUSDANSI*, Vol. 2 No.9. (Desember 2022):1-17.
- Resalawati Ade. “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”, (*Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011*).
- Teguh Budi, Muhyarsyah, dan Bastari. M, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, Vo; 2 N. 2 (Oktober 2019):36-62.
- Watung Debora Natalia. “Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya”, *Jurnal Emba*. Vol. 1 No. 3 Juni 2013,
- Wahyu Sinta, Safri Nurmantu, dan Resista Vikaliana, “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM:Sebuah Studi Pemetaan Sistematis”, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 6, No. 1 (Maret 2022): 46-56.

Yulina Alfianti Hamida, dan Suparna Wijaya, “Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6. No.2 (2022):327-341.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5425);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

WAWANCARA

R. Galuh Harnawa, Kepala Seksi Penyuluh Pajak, Kanwil DJP Jateng I, 18 Maret, 2024.

Heru Cahyono, Kepala Seksi Pengawasan IV, KPP Semarang Timur, tanggal 3 April, 2024.

Nurul Mustiyani, Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, KPP Semarang Timur, 3 April 2024.

Nindi Noventi Sudarto, Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Semarang Timur, 3 April, 2024.

LAMPIRAN

1. Bukti Surat Persetujuan Izin Penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I



Agnes Yesica Sitio <agnesyessica3004@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

13 Maret 2024 pukul 06.57

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: agnesyessica3004@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-66/RISET/WPJ.10/2024 Semarang , 13 Maret 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Agnes Yesica Sitio**
Jalan Tunjung Sari No. 2a

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00883-2024** pada **19 Februari 2024**, dengan informasi:

NIM : 11000120120139
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Judul Riset : Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (umkm) Batik Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Final Di Kota Semarang
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 Maret 2024 s/d 12 September 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan

2. Bukti Surat Persetujuan Izin Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur



Agnes Yesica Sitio <agnesyessica3004@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: agnesyesica3004@gmail.com

13 Maret 2024 pukul 06.58



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-70/RISET/WPJ.10/2024 Semarang , 13 Maret 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Agnes Yesica Sitio**
Jalan Tunjungsari No. 2a

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00882-2024** pada **19 Februari 2024**, dengan informasi:

NIM : 11000120120139
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Judul Riset : Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (umkm) Batik Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Final Di Kota Semarang
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kanwil DjP Jawa Tengah I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 Maret 2024 s/d 12 September 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan

3. Bukti Wawancara Dengan Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I



Dokumentasi dengan Bapak R. Galuh Harnawa, Kepala Seksi Penyuluh Pajak, Kanwil DJP Jateng I

4. Bukti Wawancara Dengan Pihak Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur



Dokumentasi dengan Ibu Nurul Mustiyani, Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, KPP Semarang Timur



Dokumentasi dengan Bapak Heru Cahyono, Kepala Seksi Pengawasan IV, KPP

Semarang Timur.



Dokumentasi dengan Kak Nindi Noventi Sudarto, Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, KPP Semarang Timur.